

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT

Muhammad Aini¹, Junaidi², Sitna Hajar Malawat³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NPM18120179

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NIDN1102088702

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA MAB, NIDN1113059101

email: enplaymaker@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Bumi Makmur dan bagaimana transparansi pelayanan publik dalam pelaksanaan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Bumi Makmur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Data dikumpulkan dengan wawancara kepada 6 (enam) orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) akuntabilitas pelayanan publik dari indikator adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan, dan adanya output dan outcome yang terukur menunjukkan hasil cukup baik. (2) transparansi pelayanan publik dari indikator keterbukaan, pengungkapan, dan informatif sudah terwujud dan terlaksana dengan baik. (3) pelayanan publik dari indikator bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati masih belum berjalan maksimal karena ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Trasnparansi, dan Pelayanan Publik.

ABSTRACT

The purpose of the study was to describe the accountability of public services in the implementation of the Electronic Identity Card (E-KTP) at the Bumi Makmur District Office and how the transparency of public services in the implementation of the Electronic Identity Card (E-KTP) at the Bumi Makmur District Office.

The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research.

Data were collected by interviewing 6 (six) informants. The sample was determined using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis uses data reduction, data display, and data verification.

The results of the study show that: (1) accountability of public services from indicators of conformity between implementers and standard implementation procedures, the existence of sanctions set in the implementation of activities, and the existence of measurable outputs and outcomes show good enough results. (2) transparency of public services from indicators of openness, disclosure, and information has been realized and implemented well. (3) public services from indicators of physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy are still not running optimally because there are several indicators that have not been fulfilled.

Keywords: Accountability, Transparency, and Public Service.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta. Aswaja Presindo. 151.
- Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Press.
- Kurniawan dalam Mulyadi, dkk. 2018. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung. Alfabeta. 39.
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan. Jakarta. Grasindo. 2.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 17-18.
- Putra, Teddy Minahasa, 2019. Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia. 10.
- Sinambela dalam Mulyadi, dkk. 2018. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung. Alfabeta. 39.
- Solihin, D. 2007. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Daerah. Jakarta. STIAKIN. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. 213.
- Tjoroadmudjoyo dalam Dwi Purnama Wati. 2014. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam. Lampung. Universitas Lampung. 7.
- Wiestra, dkk. dalam Febriyanti. 2014. Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian. Lampung. Universitas Lampung. 12.

I. Produk Hukum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Bumi Makmur Di Kabupaten Tanah Laut.

II. Jurnal

Mahsun, M., dkk. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPF. Vol. 3.

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi.

Wicaksono, Kristian Widya. 2015. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. JKAP. Vol 19, No 1, 17.